

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. dan Rachmawati Meita. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4 (2) : 190 – 205.
- Afkarina, Z. dan Suwardi Bambang. 2017. Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (8) : 1-18.
- Dewi, S. P. dan Suyanto. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah. *Potensio* 20 (2) : 79-100.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jemparut, M. S. dan Akhmad Riduwan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (9) : 1-18.
- Jolianis. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4, No. 2, Hal. 3457.
- Lestari, W. P., dan Sapari. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (6) : 1-17.
- Mardiasmo. 2002. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

- Novianto, R., dan Rafiudin Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi* 4 (1) : 1-22.
- Nuarisa, S. A. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1) : 89-95.
- Nugraha, I. P. dan Dwirandra. 2016. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14 (1) : 284-311.
- Paramartha, M. F. dan I Gusti Ayu. 2016. Analisisflypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15 (2) : 1536- 1564.
- Pelealu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA* 1 (4) : 1189-1197.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastiwi, Ayu, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO* : 872-879.
- Rachmawati. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis, volume 5 nomor 7, halaman 169-180.*
- Santika. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014*, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta (Tidak dipublikasikan)
- Sugiardi, N. P. dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7 (2) : 477-495.
- Sulardi dan Ulva Navatilova Menes. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas

Wilayah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 14 (2) : 155-266.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.